

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga setelah shalat, yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-quran dan assunah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara keduanya. Zakat termasuk kedalam ibadah Maliyah ijtima ‘iyah yaitu, Artinya ibadah dibidang harta memiliki kedudukan yang sama penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya pasti akan mengangkat kesejahteraan masyarakat.¹ Negara juga berperan memiliki peranan untuk menuntut orang-orang kaya agar membantu masyarakat miskin, sebab negara adalah institusi yang bertanggung jawab terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Penanganan kemiskinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 1 ayat 2 menjelaskan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan,

¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 49.

pendampingan serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.²

Salah satu penanganan yang dilakukan oleh negara terhadap kemiskinan yakni dengan cara zakat. Dimana Zakat dipandang sebagai salah satu cara untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Dalam pengelolaannya negara ikut andil sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 1 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana pada pasal 3 Tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin berkembang setelah diperbaharainya UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal dalam pelaksanaan Zakat di Indonesia. Dengan Undang Undang ini membuat pemerintah wajib memfasilitasi dan membentuk lembaga pengelolaan zakat dibawah naungan pemerintah yakni Badan Amil Zakat (BAZNAS) baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

² [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2011/09/23/uu_no 13-2011](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2011/09/23/uu_no_13-2011). (di unduh pada 26 Februari 2018 pada pukul 15.00 wib).

³ <http://www.pusat.baznas.go.id/perpuk/undang-undang/tentangpengelolaanzakat.pdf>. (di unduh pada 26 Februari 2018 pada pukul 16.00 wib).

Kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Menurut Ravallion, kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.⁴

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang biasanya dihadapi oleh suatu negara. Dimana masalah tersebut cenderung membuat beban bagi suatu negara. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Sebagai permasalahan umum, kemiskinan menjadi perhatian seluruh bangsa dunia terutama pada tingkat wilayah kabupaten serang. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan kemiskinan sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

⁴ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, ed. 5, cet. 1 (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2010), 299.

Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup. Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai keamanan dibidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Permasalahan kemiskinan selain menjadi tujuan pembangunan nasional juga mempunyai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat Beragama, seperti agama Islam. Dalam hal ini Islam telah lama mengenalkan satu alternatif pemecahannya, yakni zakat. Islam juga telah mengajarkan bagi ummatnya untuk selalu bertindak adil terhadap sesama, yang merupakan bagian dari kehidupan sosialnya. Zakat juga dapat mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka, berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten serang salah satunya ialah kemiskinan. Dimana dengan rendahnya garis kemiskinan yang berada di wilayah kabupaten serang, membuat masalah kemiskinan ini menjadi prioritas utama bagi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Serang dalam Pendistribusian Zakat. Pendistribusian Zakat menjadi salah satu cara

dalam mengatasi kemiskinan yang berada di wilayah Kabupaten Serang karena membuat masyarakat miskin mendapatkan kehidupan yang layak dan mencukupi kebutuhan dasar.

Dana zakat yang dimiliki BAZNAS sendiri mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang mana dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, Dan dari dana zakat yang terkumpul telah disalurkan untuk melaksanakan berbagai program BAZNAS Kabupaten Serang, yaitu program dana bina usaha, yang merupakan dana bantuan pembinaan dan pengembangan usaha keluarga miskin. BAZNAS juga memiliki program beasiswa pendidikan, terutama bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin. Salah satu Badan Amil Zakat yang ada di Banten yaitu BAZNAS Kabupaten Serang. BAZNAS Kabupaten Serang yang terletak di Jln. Yumaga Gg. Panerangan No. 03 Serang Banten Indonesia memiliki mekanisme pendistribusian dana zakat setiap tahunnya. Dengan adanya BAZNAS kabupaten serang ini diharapkan para muzakki dapat menyalurkan dana zakatnya ke lembaga tersebut, sehingga dana zakat dapat tersalurkan dengan baik dan tepat, juga dapat mencegah terjadinya saling berdesakan satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana pendistribusian dana zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan judul **PENGARUH DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN (STUDI DI BAZNAS KABUPATEN SERANG)**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Distribusi zakat disuatu wilayah dapat mempengaruhi perubahan kemiskinan di suatu wilayah yang bersangkutan.
2. Pengeluaran modal bergulir yang diprogramkan oleh Baznas Kabupaten Serang dapat mempengaruhi perubahan kemiskinan di wilayah Kabupaten Serang.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, penulis hanya membahas sekitar pembahasan pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap kemiskinan studi di BAZNAS Kabupaten Serang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaruh Distribusi Zakat terhadap kemiskinan ?
- b. Seberapa besar pengaruh Distribusi Zakat terhadap kemiskinan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis Pengaruh Distribusi Zakat terhadap kemiskinan.
- b. Untuk menganalisis berapa besar Pengaruh Distirbusi Zakat terhadap Kemiskinan.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi peneliti, mahasiswa, praktisi, dan perguruan tinggi. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dalam dunia akademik.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan suatu pembelajaran dalam memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh Distribusi Zakat terhadap kemiskinan. Serta memperoleh kesempatan untuk menerapkan teori yang sudah didapatkan dari perkuliahan.

- c. Bagi Instansi

Manfaat untuk penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya oleh pihak yang bersangkutan.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan pembanding penelitian lain dan memberikan sumbangan pemikiran untuk konsentrasi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Kerangka Pemikiran

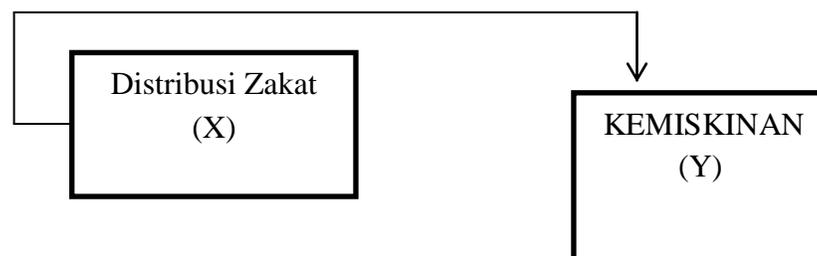
Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, pelaksanaan zakat yaitu rangkaian dari kewajiban shalat yang tidak boleh diabaikan umat islam. Jumlah ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang shalat beriringan dengan zakat tidak kurang dari 82 ayat. Menunaikan zakat merupakan ciri khas manusia yang mulia yaitu suka berbuat kebaikan, perbuatan yang baik akan terlihat jelas pada ibadah yang dilakukan oleh mereka, dimalam hari yang melakukan ibadah memohon ampunan kepada Allah SWT dan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.

Di sisi lain, kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten serang yaitu permasalahan tentang kemiskinan. Rendahnya garis kemiskinan di kabupaten serang bukan berarti masalah kemiskinan tidak menjadi prioritas utama. Pengentasan kemiskinan tetap menjadi program prioritas, karena hidup yang layak menjadi hak semua orang dan hal ini yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Serang.

Dari uraian diatas maka kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian pengaruh Distribusi Zakat terhadap Kemiskinan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I (pendahuluan), berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II (kajian pustaka), landasan teori berisi pengertian Zakat, pengertian Kemiskinan, penelitian terdahulu yang relevan, dan hipotesis penelitian.

BAB III (metode penelitian), ruang lingkup penelitian, dan metodologi penelitian yang berisi populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan hipotesis.

BAB IV (pembahasan hasil penelitian), gambaran umum objek penelitian, dan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V (kesimpulan dan saran), berisi kesimpulan dan saran.